BAB III

IZIN POLIGAMI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA DAN DESKRIPSI PUTUSAN TENTANG PEMBATALAN POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA

A. Izin Poligami Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Secara prinsip, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan asas monogami sebagai dasar hukum dalam institusi perkawinan di Indonesia. Hal ini secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 3 yang menyatakan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, namun dalam bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan.¹⁷⁴ Namun demikian, undang-undang tersebut juga membuka ruang terbatas bagi praktik poligami dalam kondisi tertentu. Ketentuan mengenai kebolehan poligami dalam undang-undang ini bersifat sebagai pengecualian. Oleh karena itu, pasal-pasal yang mengatur mengenai poligami mencantumkan secara tegas syarat-syarat serta alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk membolehkan seorang suami memiliki lebih dari satu istri.¹⁷⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membuka kemungkinan hukum bagi seorang suami untuk melakukan poligami, namun pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara sepihak atau tanpa syarat. Bagi suami yang berniat untuk menikah lagi, undang-undang mensyaratkan adanya

¹⁷⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3.

¹⁷⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 95.

izin resmi dari pengadilan. Permohonan izin ini diajukan melalui mekanisme perkara kontentius, yaitu suatu bentuk perkara yang melibatkan perselisihan atau potensi sengketa antara pihak-pihak terkait. Agar permohonan tersebut dapat dikabulkan oleh pengadilan, pemohon wajib menyampaikan alasan-alasan yang sah sebagaimana telah ditentukan secara eksplisit dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁷⁶

Perkara poligami bukan perkara voluntair yang hanya terdiri dari pihak pemohon saja, tetapi perkara poligami merupakan perkara kontentius, perkara yang ada lawan, yaitu istri terdahulu, dan istri tersebut ditempatkan sebagai termohon, hal ini karena hak-hak dan kepentingannya terganggu dan mungkin pula dirugikan.

Alasan-alasan yang tercantum pada Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan di atas bersifat fakultatif atau pilihan, yaitu apabila salah satu dari tiga alasan yang disebutkan dalam pasal tersebut dijadikan dasar dalam permohonan poligami dan pemohon mampu membuktikan alasan tersebut dengan bukti yang cukup kuat di hadapan pengadilan, maka permohonan untuk beristri lebih dari satu dapat dipertimbangkan dan dikabulkan oleh majelis hakim.¹⁷⁷

Alasan-alasan poligami di atas bersifat alternatif dan harus dibuktikan kebenarannya oleh suami yang mengajukan poligami di persidangan. Apakah benar istrinya tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri, atau

¹⁷⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4.

¹⁷⁷ M. Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.

menderita cacat, atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau mandul.¹⁷⁸ Undang-Undang Perkawinan membolehkan adanya poligami dengan adanya alasan-alasan tertentu menjadikan asas yang monogami yang dianut Undang-Undang Perkawinan bukan bersifat mutlak melainkan disebut asas monogami terbuka atau tidak bersifat mutlak.¹⁷⁹

Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menyebutkan “apabila seorang suami berkehendak memiliki istri lebih dari satu, maka ia diwajibkan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan”.¹⁸⁰ Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan mengenai kehendak suami untuk beristri lebih dari satu telah diatur pada Pasal 56 yang berbunyi “suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari pengadilan Agama”.¹⁸¹

Kemudian persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan mengajukan permohonan izin berpoligami kepada pengadilan. sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah:

- a. adanya persetujuan dari istri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.¹⁸²

¹⁷⁸ M. Anshary, h. 92.

¹⁷⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, h. 96.

¹⁸⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 40.

¹⁸¹ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 56.

¹⁸² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 5.

Persyaratan yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini bersifat kumulatif, artinya Pengadilan Agama hanya dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk berpoligami apabila seluruh syarat tersebut telah terpenuhi secara lengkap dan dapat dibuktikan secara hukum. Apabila terdapat satu saja dari syarat tersebut yang tidak terpenuhi, maka permohonan izin poligami wajib ditolak oleh pengadilan.¹⁸³

Adapun syarat kumulatif pada Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwasannya perlu ada persetujuan dari istri atau istri-istri, adanya kepastian bahwa suami sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup para istri dan anak-anak, serta adanya jaminan bahwa suami bisa bersikap adil pada para istri dan anak-anak. Dari ketetapan-ketetapan hukum yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwasannya seorang suami harus mendapatkan izin dari pengadilan terlebih dahulu untuk dapat melakukan perkawinan poligami, sehingga perkawinan poligaminya dapat tercatat sebagaimana mestinya oleh pejabat yang berwenang. Hal ini tentunya berkaitan dengan perlindungan hukum serta kepastian hukum terhadap istri dan anak dari perkawinan poligami. Perkawinan poligami tanpa adanya pencatatan resmi dari pejabat yang berwenang atau biasa yang terjadi dalam masyarakat disebut dengan nikah sirri memberikan implikasi negatif pada hak keperdataan istri dan anak jika suatu waktu terjadinya konflik dalam rumah tangga.¹⁸⁴

¹⁸³ M. Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, h. 90.

¹⁸⁴ Abdul Muarif, Achmad Aminulloh H, Arif Taufiqurrahman, dkk, *Kajian Fiqh Munakahat Kontemporer*, h. 100–101.

Pasal 56 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum".¹⁸⁵

Kompilasi Hukum Islam juga telah mengatur mengenai ketentuan bagi seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang, pada dasarnya sejalan dengan apa yang telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Pasal 55 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam kemudian menambahkan bahwa bagi suami yang tidak dapat memenuhi syarat berlaku adil, maka dilarang untuk beristri lebih dari satu.¹⁸⁶

Selanjutnya dalam Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa suami yang berkehendak memiliki istri lebih dari satu harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama yang tata caranya dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Apabila tidak memperoleh izin dari Pengadilan Agama, maka perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum.¹⁸⁷

Salah satu poin krusial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bahwa poligami dilarang kecuali dengan izin pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa negara memberikan ruang bagi seseorang yang ingin berpoligami berdasarkan norma agama, namun tetap mengutamakan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan. Persetujuan dari pengadilan

(3) ¹⁸⁵ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 ayat

¹⁸⁶ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 55.

¹⁸⁷ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 56.

meliputi pertimbangan seperti, kemampuan untuk memenuhi nafkah, adanya izin dari istri pertama, serta tanggung jawab terhadap keluarga.¹⁸⁸

Apabila seorang suami ingin beristri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonan izin ke Pengadilan Agama disertai dengan alasan-alasannya seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya dengan membawa Kutipan Akta Nikah dan surat-surat lainnya.¹⁸⁹

Mengenai permohonan izin poligami tersebut, meskipun izin poligami itu menurut peraturan perundang-undangan merupakan perkara voluntair. Akan tetapi dalam pelaksanaannya selalu melibatkan pihak lain, yaitu berkenaan dengan kepentingan pihak istri dan calon istri. Sehingga Mahkamah Agung memberikan petunjuk bahwa izin poligami tidak dapat dilakukan secara voluntair, melainkan dalam bentuk gugatan yaitu *contensius*.¹⁹⁰

Adapun Prosedur Poligami menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut.

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan
- b. Setelah permohonan diterima, pengadilan akan melakukan pemeriksaan atas sejumlah aspek penting, antara lain:

¹⁸⁸ Afrizal Mukti Wibowo, Erifendi Churniawan, Fuqoha, dkk *Pengantar Hukum Indonesia: Teori, Praktik, dan Transformasi*, (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2025), h. 279.

¹⁸⁹ Sularno, Muhammad Roy Puwart, dan Moh. Nadij, *Hukum Perkawinan Bawah Tangan Di Indonesia*, (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023), h. 92.

¹⁹⁰ Ecep Nurjalamal, *Sistem Peradilan Islam di Indonesia*, (Tasikmalaya, Edu Publisher, 2020), h. 84.

- 1) Menilai ada atau tidaknya alasan yang sah yang memungkinkan suami untuk menikah lagi.
 - 2) Memastikan adanya persetujuan dari istri, baik secara tertulis maupun lisan. Jika disampaikan secara lisan, persetujuan tersebut harus diucapkan dalam persidangan. Dalam kondisi tertentu, persetujuan istri dapat ditiadakan, misalnya jika istri tidak dapat dihubungi selama sekurang-kurangnya dua tahun atau terdapat penilaian khusus dari hakim yang membenarkan hal tersebut.
 - 3) Menilai kemampuan finansial suami untuk menafkahi istri-istri dan anak-anaknya. Dengan memperlihatkan:
 - Surat keterangan penghasilan suami yang ditandatangani bendahara tempat suami bekerja; atau
 - Surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - Surat keterangan lain yang dinilai layak oleh pengadilan.
 - 4) Menilai adanya jaminan dari suami untuk berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya. Jaminan ini harus dituangkan dalam bentuk pernyataan atau janji tertulis sesuai format yang telah ditentukan.¹⁹¹
- c. Apabila setelah melalui tahapan pemeriksaan tersebut pengadilan menyimpulkan bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon dapat dibenarkan dan seluruh syarat telah terpenuhi, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan dan memberikan izin resmi kepada suami untuk menikah lebih dari satu orang.

¹⁹¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 40-41.

Peraturan ini juga menegaskan bahwa pegawai pencatat perkawinan dilarang untuk mencatatkan pernikahan poligami tanpa adanya izin tertulis dari pengadilan. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap praktik poligami dilakukan secara sah dan berada dalam pengawasan hukum yang ketat.¹⁹²

Kemudian tata cara teknis pelaksanaannya menurut Pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah:

- a. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan
- b. Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.¹⁹³

Apabila terjadi sesuatu dan lain hal, istri atau istri-istri tidak mungkin dimintai persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat (2) menegaskan: “Persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau

¹⁹² Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, h. 97–98.

¹⁹³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 42.

karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan”.¹⁹⁴

Namun, pada Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengatakan bahwa bila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberi putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.¹⁹⁵

Kemudian disebutkan dalam Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam bahwa: “Kalau seorang istri tidak mau memberi persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi”.¹⁹⁶ Sehingga jika izin pengadilan tidak diperoleh, maka menurut ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.¹⁹⁷

¹⁹⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 5 ayat (2).

¹⁹⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 43.

¹⁹⁶ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 59.

¹⁹⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 44.

B. Deskripsi Putusan Tentang Pembatalan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama

1. Putusan No. 165/Pdt.G/2021/PA.Bjb

a. Duduk Perkara

Pemohon mengajukan surat permohonannya pada tanggal 1 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Bjb, tanggal 3 Maret 2021. Dalam permohonan tersebut tertulis pada tanggal 24 Desember 2020 Termohon I dan Termohon II melangsungkan pernikahan secara hukum Islam dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru. Setelah beberapa hari dilangsungkan pernikahan tersebut, ada seorang perempuan yang datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang yang mengaku istri Termohon I dengan membawa buku nikah Kecamatan Sukorejo Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur dengan tanggal 14 Juli 2005. Antara perempuan tersebut dan Termohon I masih terikat pernikahan yang sah secara agama dan hukum. Sehingga Pemohon selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang memanggil Termohon I terkait kebenarannya dan Termohon I mengakui bahwa ia masih terikat pernikahan yang sah dengan perempuan tersebut.

Kemudian Pemohon merasa perlu mengajukan pembatalan nikah antara Termohon I dan Termohon II melalui Pengadilan Agama

Banjarbaru untuk memperoleh ketetapan hukum dan keadilan. Pemohon merasa bertanggungjawab atas diterbitkannya kutipan akta nikah antara Termohon I dan Termohon II yang telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

b. Pemeriksaan Perkara dan Pembuktian

Pada saat pembacaan surat permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi yang dibawa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya ditemukan fakta bahwa Termohon I dan Termohon II telah menikah pada tanggal 24 Desember 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Berkas yang diajukan oleh Termohon I saat akan menikah dengan Termohon II menunjukkan bahwa status Termohon I ketika itu adalah duda cerai mati, termasuk data yang tercatat dalam aplikasi SIMKAH juga menunjukkan status Termohon I adalah duda cerai mati. Sebelum seorang perempuan bernama Istri Termohon I datang untuk melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Pemohon sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang pernah didatangi oleh orang yang mengaku sebagai keluarga dari Termohon II yang melaporkan bahwa Termohon I masih terikat perkawinan dengan seorang perempuan. Pada pembuktian juga terbukti pada saat menikah dengan Termohon II, Termohon I masih terikat perkawinan yang sah

dengan seorang perempuan bernama Istri Termohon I dan hingga saat ini belum pernah bercerai.

Adapun Termohon I dan Termohon II tidak pernah mengajukan alat bukti apapun di persidangan karena Termohon I dan Termohon II tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Bjb tanggal 4 Maret 2021 dan tanggal 16 Maret 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon I dan Termohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon I dan Termohon II tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

c. Pertimbangan Hukum

- 1) Berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Perkara tentang pembatalan perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, karenanya sesuai ketentuan penjelasan Angka 37 Pasal 49 Huruf a angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya. Pengadilan Agama Banjarbaru juga berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 38

Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Permohonan pembatalan perkawinan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang secara hukum kepentingan untuk mengajukannya, dan dilakukan melalui Pengadilan yang mencakup wilayah hukum tempat dilangsungkannya perkawinan, tempat tinggal bersama antara suami dan istri, atau tempat tinggal salah satu pihak, baik suami maupun istri. Kemudian Pasal 74 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan.

- 2) Pemohon sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas terbitnya buku Kutipan Akta Nikah atas nama Termohon I dan Termohon II mengajukan permohonan pembatalan perkawinan Termohon I dan Termohon II. Karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 73 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ini.
- 3) Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang

Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan seorang (suami) yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali telah mendapat izin dari pengadilan, setelah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sehingga perkawinan Termohon I dengan Termohon II dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan yang kedua, yakni adanya izin Pengadilan Agama berdasarkan prosedur sesuai ketentuan mengenai persyaratan beristeri lebih dari seorang, karenanya Majelis Hakim menilai Termohon I telah melakukan poligami liar. Kemudian Termohon I telah menikah dengan menyampaikan keterangan yang tidak jujur, yaitu dengan mencantumkan status perkawinannya sebagai duda cerai mati, padahal di waktu bersamaan, Termohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan seorang perempuan bernama Istri Termohon I.

- 4) Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam, permohonan pembatalan perkawinan itu dapat dikabulkan dan Kutipan Akta Nikah tertanggal 24 Desember 2020 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang tidak berlaku dan tidak mempunyai ketentuan hukum.

d. Amar putusan diucapkan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1442 Hijriah yang isinya:

- 1) Menyatakan Termohon I dan Termohon II yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2) Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian dengan verstek;
- 3) Membatalkan perkawinan Termohon I (**Termohon I**) dengan Termohon II (**Termohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- 4) Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: -----
- tanggal 24 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 5) Menolak permohonan Pemohon selainnya;
- 6) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu

2. Putusan Nomor 371/Pdt.G/2022/PA.Tgr.

a. Duduk Perkara

Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor

371/Pdt.G/2022/PA.Tgr mengemukakan hal bahwa pada tanggal 02 Oktober 2019, Termohon I dan Termohon II melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0291/01/X/2019, tanggal 02 Oktober 2019. Selama pernikahan tersebut Termohon I dan Termohon II belum memiliki anak. Kemudian ada seorang perempuan yaitu sebagai Pemohon pada bulan Januari 2022 yang datang pada Kantor Urusan Agama Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara bahwa Pemohon merupakan istri sah dari Termohon I dan dikuatkan berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kabupaten Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 699/49/VI/2010, tanggal 03 Juni 2010.

Pada saat Termohon I melaksanakan pernikahan dengan Termohon II, Termohon I mengaku berstatus jejaka dan Termohon II mengaku berstatus perawan. Dan sekarang karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengetahui perihal kejadian tersebut, maka apa yang telah dilakukan oleh Termohon I selama ini salah karena Termohon I telah melakukan Poligami tanpa seizin Pemohon dan tidak mendapat Penetapan dari Pengadilan Agama.

Kemudian Termohon III ditarik dalam perkara ini karena Termohon III adalah Pejabat yang melakukan pencatatan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II, oleh karenanya Termohon III berkewajiban untuk menjelaskan proses pelaksanaan perkawinan hingga penyelenggaraan pencatatan perkawinan tersebut. Termohon III juga bertanggung jawab untuk mencoret dan mencatat pembatalan perkawinan tersebut dalam buku yang khusus untuk itu, apabila perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian Termohon III memiliki kepentingan hukum dengan perkara ini, untuk itu Termohon III harus dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini.

b. Pemeriksaan Perkara dan Pembuktian

Pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon I dan Termohon II tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tenggara, dan Termohon III pernah hadir di persidangan kedua dan Kelima, sedang sidang yang lainnya dia tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Termohon III memberikan jawaban bahwa Kepala Kantor Urusan Agama sudah meneliti kelengkapan berkas persyaratan nikah mereka, namun tidak mengetahui bahwa Termohon I memalsukan identitasnya yaitu statusnya sebagai jejak, padahal sudah menikah dengan

Pemohon. Termohon III mengetahui adanya pemalsuan identitas oleh Termohon I sejak adanya laporan dari Pemohon yaitu bulan Januari 2022

Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi. Keterangan para saksi menyatakan bahwa Pemohon tidak pernah memberi izin kepada Termohon I untuk menikah lagi sehingga Termohon I memalsukan identitasnya dengan mengaku berstatus jejak. Pemohon mengetahui pernikahan Termohon I dengan Termohon II pada bulan Januari 2022. Adapun Termohon III membenarkan alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon dan telah melakukan pencatatan perkawinan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan Standar Operasional Prosedur Pencatatan Perkawinan dilingkungan Kementerian Agama.

Kemudian dapat disimpulkan fakta-fakta hukum bahwa Pemohon dengan Termohon I adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 3 Juni 2010 dan belum pernah terjadi perceraian hingga sekarang. Termohon I dengan Termohon II menikah pada tanggal 2 Oktober 2019 di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara. Termohon I menikah dengan Termohon II, tidak ada izin dari Pengadilan Agama dan juga tidak ada izin dan persetujuan dari Pemohon sebagai isteri pertama. Termohon I telah memalsukan keterangan status Termohon I dengan keterangan status Termohon I Belum Kawin (Jejaka), sehingga

Kantor Urusan Agama Muara Badak menikahkan keduanya secara resmi.

c. Pertimbangan Hukum

- 1) Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 1 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain pembatalan nikah, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama
- 2) Perkawinan antara Termohon I dengan Termohon I yang dilaksanakan pada, tanggal 2 Oktober 2019 sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0291/01/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kutai Kartanegara, terbukti telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena

perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa izin dan persetujuan dari Pemohon yang masih berstatus sebagai isteri sah dari Termohon I dan juga Perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II tanpa izin dari Pengadilan Agama.

- 3) Perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II telah terjadi pemalsuan keterangan dengan menyatakan bahwa Termohon I berstatus Jejaka dan faktanya bahwa Termohon I hingga saat ini masih berstatus Kawin sebagai suami sah dari Pemohon. Majelis Hakim menilai, bahwa pencatatan tersebut cacat hukum sehingga dapat untuk dibatalkan sebagaimana maksud Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “ Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri”. Oleh karena itu, maka permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0291/01/X/2019, tanggal 02 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kutai Kartanegara tidak berkekuatan hukum tersebut dapat dikabulkan. Majelis Hakim menyatakan membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kutai Kartanegara pada tanggal 2 Oktober 2019.

- d. Amar putusan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1443 Hijriah yang isinya:
- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 - 2) Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Termohon I (Sufandi bin Samsul) dengan Termohon II (Samsul) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 02 Oktober 2019;
 - 3) Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0291/01/X/2019, tanggal 02 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara tidak berkekuatan hukum;
 - 4) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 3.040.000,00 (Tiga juta empat puluh ribu rupiah);
3. Putusan Nomor 5684/Pdt.G/2024/PA.Sby
- a. Duduk Perkara

Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 November 2024 telah mengajukan pembatalan perkawinan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 5684/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 29 November 2024 dengan dalil-dalil bahwa Penggugat dan Tergugat I menikah menikah secara agama Islam dihadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan . . . , Kota Surabaya pada tanggal 24 Agustus 2019

sebagaimana telah tercatat dengan Akta Nikah Nomor: 0382/109/VIII/2019. Selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat I belum dikatunai anak dan kehidupan rumah tangga mereka harmonis. Beberapa bulan terakhir Penggugat mencari tahu apa yang dilakukan Tergugat I diluar rumah selain bisnis karena Penggugat menaruh curiga terhadap Tergugat I yaitu Tergugat I mempunyai selingkuhan, dan hal tersebut terbukti jika Tergugat I telah menikah dengan Tergugat II di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan . . . , Kota Bekasi pada tanggal 06 Oktober 2024 sebagaimana tercatat dalam register nomor : 3275021102024030 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan . . . , Kota Bekasi.

Perkawinan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dapat berlangsung di hadapan Turut Tergugat, yaitu Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. . . . , Kota Bekasi karena adanya keterangan palsu yaitu Tergugat I mengaku jejaka. Tergugat I telah melangsungkan Poligami Tanpa Seizin dari Pengadilan Agama, sehingga Penggugat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II.

b. Pemeriksaan Perkara dan Pembuktian

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasanya hadir di persidangan, sedangkan para Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau

wakilnya, meskipun para Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 5684/Pdt.G/2024/PA.Sby yang dibacakan di depan sidang dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum.

Dalam Persidangan Penggugat menyerahkan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagai dalil permohonannya. Saksi 1 dan saksi 2 Penggugat memberikan keterangan yang intinya mengetahui Tergugat I menikah lagi dengan Tergugat II. Pada pembuktian kemudian diperoleh fakta hukum bahwa sebagai suami istri Penggugat dan Tergugat I masih dalam ikatan perkawinan, belum dikaruniai seorang anak dan belum pernah bercerai, perkawinan Tergugat I dan Tergugat II dilakukan dengan status jejaka dan janda, dan ketika Tergugat I menikah dengan Tergugat II, Tergugat I tidak mempunyai izin menikah (Poligami) dari Pengadilan Agama.

c. Pertimbangan Hukum

- 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya pada huruf a angka 6 juncto Pasal 25 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, perkara *a quo* dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama Surabaya.

- 2) sesuai ketentuan Pasal 23 Huruf d Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat sebagai pihak yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan hukum, sehingga mempunyai legal standing sebagai Penggugat untuk mengajukan pembatalan perkawinan dalam perkara *a quo*.
- 3) Berdasarkan fakta-fakta persidangan, ketika Tergugat I masih berstatus suami dari Penggugat, Tergugat I menikah dengan Tergugat II pada tanggal 06 Oktober 2024, Kutipan Akta Nikah Nomor 3275021102024030, tertanggal 07 Oktober 2024, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan . . . , Kota Bekasi, status Tergugat I adalah jejaka. Perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II melanggar ketentuan Pasal 9 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 71 a Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah terbukti sehingga patut dikabulkan dengan membatalkan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II. Sehingga Kutipan Akta Nikah Nomor 3275021102024030, tertanggal 07 Oktober 2024, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan . . . , Kota Bekasi harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

d. Amar putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriah.

- 1) Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2) MengabulkangugatanPenggugatdenganverstek;
- 3) Membatalkan Perkawinan Tergugat I (. . .) dengan Tergugat II (. . .) yang dilangsungkan pada tanggal 06 Oktober 2024, tercatat di . . . , Kota Bekasi, Nomor 3275021102024030, tertanggal 07 Oktober 2024;
- 4) Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 3275021102024030, tertanggal 07 Oktober 2024, yang dikeluarkan . . . , Kota Bekasi, tanggal 07 Oktober 2024, tidak berkekuatan hukum;
- 5) Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp702.000,00 (tujuh ratus dua ribu rupiah);

Deskripsi tiga putusan di atas secara ringkas dapat dilihat pada matriks berikut.

Nomor Putusan	Alasan Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan
165/Pdt.G/2021/PA.Bjb	Termohon I mengaku saat akan menikah dengan Termohon II berstatus duda cerai mati	Perkawinan Poligami Termohon I dan Termohon II dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama dan sesuai Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1	Dikabulkan

		Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam permohonan pembatalan perkawinan itu dapat dikabulkan	
371/Pdt.G/2022/PA.Tgr.	Ketika Termohon I melaksanakan pernikahan dengan Termohon II, Termohon I mengaku berstatus jejaka dan Termohon II mengaku berstatus perawan.	Majelis Hakim menilai poligami tersebut cacat hukum sehingga dapat untuk dibatalkan sebagaimana Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam	Dikabulkan
5684/Pdt.G/2024/PA.Sby	Perkawinan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan keterangan palsu yaitu Tergugat I mengaku jejaka	Perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 71 a Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah terbukti sehingga patut dikabulkan dengan membatalkan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II.	Dikabulkan